

CASCADING DOWN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2016

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
Tujuan 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat dan peningkatan konservasi energi			Tujuan 2. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan potensi migas dan panas bumi		Tujuan 3. Terwujudnya peningkatan pendayagunaan dan konservasi potensi sumber daya mineral dan air tanah			Tujuan 4. Terwujudnya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan geologi		Tujuan 5. Terwujudnya optimalisasi investasi, pendapatan dan kesempatan kerja di bidang energi dan sumber daya mineral		Tujuan 6. Optimalisasi kerjasama dengan para pemangku kepentingan		Tujuan 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sasaran 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur listrik	Sasaran 2. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal	Sasaran 3. Meningkatnya penghematan energi	Sasaran 4. Meningkatnya jumlah wilayah kerja panas bumi yang berproduksi	Sasaran 5. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan potensi migas	Sasaran 6. Meningkatnya pengelolaan perusahaan sumber daya mineral	Sasaran 7. Meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air	Sasaran 8. Meningkatnya konservasi air tanah	Sasaran 9. Meningkatnya penanganan mitigasi bencana alam geologi untuk mengurangi resiko bencana	Sasaran 10. Meningkatnya jumlah wirausahawan baru sektor ESDM	Sasaran 11. Optimalisasi pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral	Sasaran 12. Meningkatnya kerjasama dengan para pemangku kepentingan	Sasaran 13. Meningkatnya keahlian dan kompetensi aparatur bidang energi dan sumber daya mineral	Sasaran 14. Meningkatnya infrastruktur untuk kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di bidang energi dan sumber daya mineral	Sasaran 15. Meningkatnya jumlah produk hukum daerah bidang energi dan sumber daya mineral		
1. Rasio Elektrifikasi Rumah	2. Jumlah Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan	3. Persentase jumlah gedung kantor di lingkup OPD Pemprov Jabar yang melakukan penghematan energi	4. Jumlah Wilayah Kerja Panas Bumi yang berproduksi	5. Jumlah Wilayah Kerja Migas yang diusahakan/ berproduksi	6. Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise	7. Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air	8. Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah	9. Rasio ketersediaan peta bencana geologi	10. Jumlah wirausahawan baru sektor ESDM	11. Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral	12. Digunakannya Data Dinas ESDM Provinsi oleh Kabupaten/Kota	13. Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral	14. Tingkat pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur bidang energi dan sumber daya mineral	15. Jumlah produk hukum daerah bidang energi dan sumber daya mineral		

KEPALA BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI			KEPALA BIDANG PANAS BUMI DAN MIGAS			KEPALA BIDANG MINERAL GEOLOGI DAN AIR TANAH			KEPALA BIDANG BINA USAHA DAN KERJASAMA			SEKRETARIS		
1.1 Rasio Elektrifikasi Rumah	1.2 Tingkat pelayanan perizinan ketenagalistrikan	2.1 Jumlah Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan	4.1 Jumlah Wilayah Kerja Panas Bumi yang berproduksi	4.2 Jumlah kapasitas produksi panas bumi	5.1 Jumlah Wilayah Kerja Migas yang diusahakan/ berproduksi	6.1 Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise	6.2 Persentase usaha pertambangan dengan sertifikat CnC	7.1 Rasio ketersediaan peta bencana geologi	10. Jumlah wirausahawan baru sektor ESDM dari dana APBD	10. Jumlah wirausahawan baru sektor ESDM dari dana CSR	11. Jumlah PAD dan DBH sektor ESDM	14. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas ESDM	14. Persentase pemenuhan kebutuhan kesejahteraan aparatur Dinas ESDM	14. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional Dinas ESDM dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
2.2 Persentase EBT dalam bauran energi	3.1 Persentase jumlah gedung kantor di lingkup OPD Pemprov Jabar yang melakukan penghematan energi	3.2 Persentase EBT dalam bauran energi	5.2 Tingkat Kelancaran Distribusi Niaga Migas Hilir	5.2 Tingkat Kelancaran Distribusi Niaga Migas Hilir	5.2 Tingkat Kelancaran Distribusi Niaga Migas Hilir	8.1 Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah	8.2 Tingkat pelayanan perizinan air tanah	9.2 Tingkat pengembangan kawasan lindung geologi dan geowisata	12. Terdesiminasinya data dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Dinas Kabupaten/Kota	12. Jumlah dokumen data dan informasi bidang ESDM	12. Jumlah dokumen data dan informasi bidang ESDM	14. Persentase ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur Dinas ESDM sesuai standar daerah	14. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Dinas ESDM	14. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan
3.2 Persentase OPD Pemprov Jabar yang melaporkan penggunaan energinya														

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA ENERGI DAN PEMANFAATAN EBT	KEPALA SEKSI KONSERVASI DAN PENGENDALIAN ENERGI	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HILIR	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HULU	KEPALA SEKSI TEKNIK DAN LINGKUNGAN	KEPALA SEKSI KEGEOLOGIAN	KEPALA SEKSI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI	KEPALA SEKSI KONSERVASI DAN PENGENDALIAN	KERALA SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI	KERALA SEKSI DATA DAN INFORMASI	SEKSI BINA USAHA DAN PRODUKSI	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
1.1 1 Dokumen roadmap pengembangan jaringan listrik menuju RE Jawa barat 100%	2.1 1 (satu) Laporan kegiatan workshop pengembangan pemanfaatan EBT	3.1 1 (satu) laporan kegiatan pengadaan media promosi, publikasi dan sosialisasi konservasi dan penghematan energi	5.1 1 (satu) Dokumen Inventarisasi Jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi	4.1 1 (satu) buku tentang Geothermal	4.1 1 (satu) laporan kegiatan Koordinasi konsultasi dan sosialisasi pengelolaan panas bumi di Jawa Barat	6.2 1 (dokumen) potensi WIUP Mineral Logam dan Batubara	8.1 3 (tiga) dokumen evaluasi Zona konservasi air tanah di CAT Bandung-Soreang, CAT Bekas-Karawang, CAT Bogor	6.1 1 (satu) laporan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan prinsip Good Mining Practise	10. 400 orang wirausaha baru sektor ESDM	12. 1 (satu) Buletin Dinas ESDM	11. 1 (satu) Dokumen Pendapatn daerah sektor ESDM	14. 4 (empat) Dokumen Perencanaan (Renja, Renja Perubahan, Renstra Perubahan, RKT)	14. Jumlah laporan kegiatan pengurusn rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta-ketertiban, keindahan dan keamanan kanfor	14. Jumlah dokumen laporan kegiatan pembinaan terhadap pengelola keuangan
1.1 1 aplikasi sistem informasi ketenagalistrikan	2.1 1 (satu) instalasi Biogas di Kab. Bandung	3.1 1 (satu) dokumen kajian penerapan konsep konservasi dan green energy di wilayah perkotaan		4.1 1 (satu) laporan kegiatan bedah buku tentang Geothermal	4.2 1 (satu) laporan kegiatan peningkatan kapasitas Industri Geothermal (direct use) di Jawa Barat	6.3 1 (satu) dokumen Basis Data Pertambangan	8.2 1 (satu) dokumen data dan informasi penerbitan pertimbangan teknis air tanah yang terfasilitasi	8.1 1 (satu) titik sumur pantau dan tersedianya data fluktuasi muka air tanah pada zona rawan di CAT Sukabumi	10. 1 (satu) dokumen evaluasi dan montoring wirausaha baru sektor ESDM	12. 1 (satu) Buku Profil Data dan Statistik ESDM Jawa Barat 2016	11. 1 (satu) Dokumen pendataan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14. 1 (satu) Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor ESDM di Jawa Barat	14. Jumlah laporan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	14. Jumlah laporan keuangan yang termutakhirkan
1.2 1 (satu) bahan tayang proses penjinan dan sertifikasi ketenagalistrikan	2.1 3 (tiga) aplikasi Konversi EBT di UPTD Cianjur, Purwakarta, dan Tasikmalaya	3.2 1 (satu) dokumen audit energi bangunan pada sektor publik			4.2 6 (enam) laporan kegiatan sosialisasi pendidikan dasar panas bumi di Jawa Barat	9.1 1 (satu) dokumen peta, data dan informasi teknis daerah bencana alam geologi	14. 1 (satu) dokumen bahan rancangan produk hukum sektor ESDM			13. 1 (satu) Laporan kegiatan BinteK GIS dan Pengolahan Data	11. 1 (satu) aplikasi perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)	14. 1 (satu) laporan kegiatan Forum Kepala Dinas Sektor EDM	14. Jumlah dokumen penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan	14. Jumlah laporan keuangan yang dikelola
1.2 1 (satu) aplikasi penerbitan rekomendasi teknis perizinan ketenagalistrikan	2.1 1 (satu) dokumen hasil survey dan inventarisasi potensi dan pemanfaatan energi di Jawa Barat	3.2 1 (satu) bahan tayang publikasi dan sosialisasi peningkatan upaya konservasi dan penghematan energi pada OPD Provinsi dan kab/kota			5.2 1 (satu) laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pengelolaan minyak dangas bumi ke KKKS Migas di Jawa Barat	9.2 1 (satu) dokumen peta delineasi Kawasan Geopark di Jawa Barat	8.1 1 (satu) dokumen kajian hidrogeologi ciletuh					14. 3 (tiga) Dokumen Evaluasi Tahunan (LPPD, LKPI, LKIP)	14. Jumlah dokumen pengelolaan hubungan masyarakat	
1.2 1 (satu) aplikasi penerbitan sertifikat laik operasi	2.1 2 (dua) unit PLTMH yang direvitalisasi (Kab. Bandung Barat dan Kab. Tasikmalaya)	3.2 1 (satu) laporan kegiatan bimbingan teknis audit energi				9.2 1 (satu) dokumen Dosir Geopark Global Network						14. 12 (dua belas) Dokumen Evaluasi Bulanan dan 4 (empat) Dokumen Evaluasi Triwulanan	13. Jumlah Diklat/BinteK/training terkait pembinaan jabatan fungsional	
2.1 1 (satu) Laporan kegiatan acara apresiasi inovasi energi Jawa Barat	2.1 Media publikasi dan promosi pengembangan pemanfaatan EBT											14. 1 (satu) Dokumen Monitoring dan Evaluasi	13. Jumlah dokumen kepegawaian pada UPTD yang dikelola	
2.2 1 (satu) Dokumen Rencana Umum Energi Daerah												14. 1 (satu) buku Proceeding Hasil Kajian Dinas ESDM	13. Jumlah dokumen penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional	
													13. Jumlah dokumen penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai	
													13. Jumlah dokumen penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai	
													15. Jumlah dokumen penyusunan -bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan	

KEPALA UPTD ESDM WILAYAH I sd V	KEPALA BALAI PENGUJIAN
1.1 Persentase data infrastruktur ketenagalistrikan untuk peningkatan rasio elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM	10. Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral dari retribusi jasa laboratorium
7.1 Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun.	10. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Balai Pengujian ESDM
6.1 Jumlah perusahaan pertambangan umum yang dibina.	
6.1 Jumlah perusahaan yang memanfaatkan batubara yang dibina	
8.1 Jumlah pengambil air tanah yang dibina	

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MINERAL PADA UPTD ESDM WILAYAH I sd V	KEPALA SEKSI ENERGI PADA UPTD ESDM WILAYAH I sd V	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PADA UPTD ESDM WILAYAH I sd V	SEKSI TEKNIS PENGUJIAN	SEKSI PENGEMBANGAN	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
7.1 4 (empat) titik sumur bor (masing-masing 1 titik di UPTD Wilayah II s.d V)	1.1 5 (lima) Dokumen Inventarisasi Rumah Belum Berlistrik di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I s/d V	12. Jumlah data dan informasi yang dikelola	10. 1 (satu) Dokumen penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian kualitas dan sertifikasi produk energi dan sumberdaya mineral	10. 1 (satu) Dokumen penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan dan pengujian teknologi energi dan sumberdaya mineral	13. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola;
6.1 152 lokasi pertambangan yang dibina (40 di UPTD I, 12 di UPTD II, 30 di UPTD III, 50 di UPTD IV, dan 20 di UPTD V)	1.1 5 (lima) Dokumen Inventarisasi Data Infrastruktur Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I /sd V	13. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola;	10. 1 (satu) Dokumen laporan pengujian kualitas dan sertifikasi produk energi dan sumberdaya mineral	10. 1 (satu) Dokumen laporan pengembangan dan pengujian teknologi energi dan sumberdaya mineral	14. Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dikelola;
6.1 76 lokasi pertambangan batu bara yang dibina (10 di UPTD I, 16 di UPTD II, 35 di UPTD III, 5 di UPTD IV, dan 10 di UPTD V)	1.1 5 (lima) Dokumen Evaluasi Bantuan dalam Kegiatan Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I s/d V Tahun 2014-2015.	14. Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dikelola;			14. Jumlah dokumen tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan
8.1 675 pengusaha pengambil airtanah yang dibina (200 di UPTD I, 300 di UPTD III, 100 di UPTD IV, dan 75 di UPTD V)	1.1 5 (lima) Dokumen Money, koordinasi dan Studi Komparatif dalam rangka Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I s/d V	14. Jumlah dokumen tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan			